

ABSTRAK

Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di daerah Kabupaten hingga saat ini masih belum optimal dalam segi manfaat yang di rasakan oleh daerah yang terkena dampak langsung dari kegiatan tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut di keluarkannya Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang hak bagi hasil atau *Participating Interest* 10%, akan tetapi hingga saat ini adanya permen ESDM tersebut belum dirasakan oleh Kabupaten Sampang, meskipun dalam praktiknya sudah di bentuk BUMD Kabupaten Sampang yakni PT.GSM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan terkait penerapan dari Permen ESDM Tersebut dan pelaksanaan serta kendala yang di hadapi sehingga permen Esdm belum di rasakan hingga tahun 2020 ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris (*Applied Law Research*). Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus yang terjadi di lapangan yang dikaitkan pada Peraturan Perundang-undangan yang nantinya akan menghasilkan paparan konsep dari hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penerapan dari Peraturan Menteri ESDM terkait pembagian besaran bagi hasil 10% di Kabupaten Sampang masih belum terlaksana dan memerlukan beberapa tindakan diantaranya pengkajian ulang substansi isi Permen ESDM terkait pemberian PI melalui BUMD dan keikutsertaan pihak swasta, ditambahkan nya wewenang kepada Pemerintah Kabupaten/kota, dan hal terkait pertanggung jawaban dampak dari pengelolaan ini terhadap Kabupaten Sampang.

Kata kunci: Minyak dan Gas Bumi, *Participating Interest*, PT.GSM.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	10
1.3	Tujuan Penelitian	11
1.4	Kegunaan Penelitian	11
1.5	Keaslian Penelitian	13
1.6	Metode Penelitian	13
1.6.1	Jenis Penelitian	13
1.6.2	Pendekatan Penelitian	14
1.6.3	Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	17
1.7	Sistematika Penulisan	18

BAB II KONSEP DAN TEORI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA 20

2.1	Konsep Pengelolaan	
2.1.1	Pengertian Umum Pengelolaan	20
2.1.2	Prinsip dalam Pengelolaan	22
2.1.3	Konsep Hak Menguasai Negara	25
2.2	Minyak dan Gas Bumi di Indonesia	
2.2.1	Sejarah Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.....	26
2.2.2	Peraturan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	30
2.2.3	Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	36
2.3	Laut dan Pencemarannya	40
2.4	<i>Participating Interest</i> dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	
2.4.1	Pengertian dan Sejarah Lahirnya <i>Participating Interest</i>	42
2.4.2	Teori Rekonstruksi Hukum	45

BAB III REKONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN *PARTICIPATING INTEREST* DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SAMPANG 48

- 3.1 Pengaturan *Participating Interest* dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia 48
- 3.2 Mekanisme dan Kendala Pelaksanaan *Participating Interest* dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Sampang 50
 - 3.2.1 Pembentukan PT.GSM Selaku BUMD Kabupaten Sampang dalam Memperoleh Besaran *Participating Interest* 10% . 50
 - 3.2.2 Kendala dalam Pelaksanaan *Participating Interest* di Kabupaten Sampang dalam Memperoleh Besaran 10% ... 57

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan 63
- 4.2 Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

DAFTAR SINGKATAN

BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
HMN	Hak Menguasai Negara
K3S	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
MIGAS	Minyak dan Gas Bumi
MK	Mahkamah Konstitusi
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PI	<i>Participating Interest</i>
PERMEN ESDM	Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral
PT. GSM	PT. Geliat Sampang Mandiri
PT. PJSE	PT. Petronas Jatim Sampang Energi
PT. PJU	PT. Petronas Jatim Utama
SDA	Sumber Daya Alam
SKK MIGAS	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
UUD NRI TAHUN 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU MIGAS	Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi
UU PEMDA	Undang-Undang Pemerintahan Daerah
WK	Wilayah Kerja